

ADAKAH PERBEDAAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGENDALIAN KORUPSI ANTARA NEGARA MAJU, MENENGAH DAN MISKIN?

¹ Tri Joko Prasetyo, Universitas Lampung, Indonesia

² Marselina Marselina, Universitas Lampung, Indonesia

Informasi Naskah

Submitted: 25 Agustus 2022

Revision: 11 November 2022

Accepted: 16 November 2022

Kata Kunci:

Level of Democracy, The Effectiveness of Government, Quality of Regulations, Control of Corruption

Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of good government as measured by the level of democracy, the effectiveness of government and the quality of regulations on controlling corruption in high, middle and low income countries. Samples were high, middle and low income countries represented all continents in the world for 5 years. Research found that the level of democracy, government effectiveness and regulatory quality had a significant effect on the control of corruption, but the level of prosperity/economy income positively correlates with democracy, government effectiveness and regulatory quality so that countries with better income show higher variable levels both at the level of corruption control, the level of democracy, government effectiveness and the quality of regulation. Control of corruption in the High income countries just variable quality regulation is significant. In middle income countries level of democracy and government effectiveness that significant, and the low countries just only democracy that significant. These findings can be a policy in improving control of corruption depending countries income so that the policy can be more effective.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tata kelola pemerintahan yang diukur dari tingkat demokrasi, efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi dalam pengendalian korupsi di negara berpenghasilan tinggi, menengah dan rendah. Sampel adalah negara berpenghasilan tinggi, menengah dan rendah yang mewakili semua benua di dunia selama 5 tahun. Penelitian menemukan bahwa tingkat demokrasi, efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi berpengaruh signifikan terhadap pengendalian korupsi, namun tingkat kemakmuran/pendapatan ekonomi berkorelasi positif dengan demokrasi, efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi sehingga negara dengan pendapatan yang lebih baik menunjukkan variabel yang lebih tinggi. tingkat baik pada tingkat pengendalian korupsi, tingkat demokrasi, efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi. Pengendalian korupsi di negara-negara berpenghasilan tinggi hanya regulasi kualitas variabel yang signifikan. Di negara-negara berpenghasilan menengah tingkat demokrasi dan efektivitas pemerintahan yang signifikan, dan negara-negara rendah hanya demokrasi yang signifikan. Temuan ini dapat menjadi kebijakan dalam meningkatkan pengendalian korupsi tergantung pada pendapatan negara sehingga kebijakan tersebut dapat lebih efektif.

* *Corresponding Author.*

Tri Joko Prasetyo, e-mail: trijoko.prasetyo@feb.unila.ac.id

PENDAHULUAN

Kejatuhan suatu pemerintahan karena korupsi terjadi di berbagai negara di dunia antara lain yang terbaru presiden Srilanka dan yang sudah Presiden Philipina Ferdinan Marcos, Presiden Indonesia Suharto yang telah memimpin selama 32 tahun, Perdana Menteri Thailand dan terakhir PM Malaysia Nazib Razak serta Raja Spanyol. Negara-negara yang mengalami hal sama cukup banyak sebagian besar negara-negara di Asia, Afrika, Amerika latin. Bukan hanya negara miskin tetapi negara maju juga terjadi kasus korupsi seperti di Korea, Italia Spanyol dll.

Korupsi atau rasuah tindakan pejabat public, baik politisi amupun pegawai negri, sesrta pihak lain yang terlibat dalam tindakan ini secara tidak wajar dan illegal menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001). Korupsi dibenci dan dimusuhi rakyat dimanapun karena dapat menyebabkan rendahnya tingkat investasi, menurunkan pertumbuhan ekonomi, rendahnya pendapatan perkapita, ketimpangan sosial serta menurunkan kesejahteraan (Mauro, 1995; Treisman, 2000; Farooq et al., 2013; Gupta et al., 2002). Korupsi juga menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak (Djayasinga & Prasetyo, 2019). Penyebab korupsi dari beberapa penelitian bermacam-macam namun pada intinya adalah tata kelola pemerintahan yang tidak baik (UNDP, 1997). (Treisman, 2000) menemukan bahwa bahwa negara dengan sejarah peraturan hukum yang ketat dan negara yang ekonominya sudah maju maka tingkat penendalian korupsinya lebih tinggi. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat demokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengendalian korupsi, hal ini mungkin terjadi karena sampel penlitian sebagian besasr negara maju dan berkembang. (Churchill et al., 2013) menemukan bahwa yang mempengaruhi pengurangan tingkat korupsi suatu negara adalah adanya keterbukaan ekonomi, stabilitas politik, dan keberagaman etnis. Sedangkan (Türedi & Altiner, 2016) menemukan bahwa faktor yang dapat mengurangi tingkat korupsi adalah tingkat demokrasi, stabilitas politik, keterbukaan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

IMF menyarankan tata kelola yang baik untuk mengurangi korupsi. Tata kelola pemerintahan menurut (UNDP, 1997) adalah suatu ketrampilan dalam melaksanakan kewenangan kekuasaan dalam bidang ekonomi, politik dan administrative untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatan dan merupakan intrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, persatuan dan kebersamaan sosial dalam masyarakat.

Prinsip tata kelola pemerintahan adalah adanya Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran/*Fairness* (Effendi, 2009). Tata kelola pemerintahan antara lain (1) bagaimana pemerintah dipilih, dimonitor dan diganti serta partisipasi setiap warga negara yang memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan penting baik secara langsung atupun melalui lembaga perwakilan. Demokrasi ini menurut (UNDP, 1997) meliputi juga kesempatan bagi masyarakat lelaki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini yang menjadi indikator adalah tingkat demokrasi. (2) Kapasitas pemerintah membuat kebijakan yang baik, tranparan, berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak, berkeadilan, tidak adanya diskriminatif, adanya kebebasan berinvestasi, berusaha dan tidaka da kebijakan monopili sehingga indikator kelompok ini adalah kualitas regulasi; (3) Bagaimana pemerintah menghormati warga negara, mengatur interaksi ekonomi dan sosial masyarakat, efektif dan efisien dalam setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan melalui pemanfaatan berbagai sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya sehingga indikatornya adalah efektivitas pemerintah (Effendi, 2009).

Penerapan *e-paning* dan *e-budgeting* dapat mencegah korupsi dengan contoh yang terjadi di DKI Jakarta dimana adanya usulan yang tidak wajar atas pembelian Lem dan Harga UPS segera diketahui oleh masyarakat dan dibatalkan anggaran tersebut. (Fathia et al., 2020) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dapat meningkatkan tingkat pengendalian korupsi di negara-negara Asia pasifik. Demikian pula dengan penelitian (Sulaiman et al., 2019) di semua Kabupaten dan kotamadya di Aceh bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dapat meningkatkan kinerja apartur sipil negara dan akhirnya meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.

Tingkat pendapatan per kapita negara berkorelasi positif dengan tingkat demokrasi, kualitas regulasi dan efektivitas pemerintah serta tingkat pengendalian korupsi. Bank dunia mengelompokkan negara berdasarkan pendapatan per kapita menjadi 3 yaitu negara dengan pendapatan per kapita tinggi, menengah dan bawah.

Negara maju memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi yaitu (800 – 1000), hal ini berarti tingkat kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Negara maju juga adanya kehidupan demokrasi yang tinggi, Negara yang sedang berkembang (middle income) merupakan negara dengan pendapatan per kapita diatas \$900 dan dibawah \$11.456 per tahun. Negara sedang berkembang masih dalam proses pembangunan, dan pada negara ini kasus korupsi masih banyak terjadi, Negara miskin (low income) masih banyak mengalami masalah kelaparan, keterbelakangan pendidikan dan kesehatan, konflik dan perang serta korupsi masih menjadi masalah yang ekstrim terjadi. Kondisi politik dan ekonomi juga tidak stabil.

Perbedaan kondisi negara maju, berkembang dan miskin diduga mempengaruhi determinan atas tingkat kontrol atas korupsi antara negara kaya, menengah dan miskin juga berbeda. Penelitian tentang korupsi selama ini belum ada yang memisahkan antara negara maju, berkembang dan miskin sehingga hal ini menjadi fokus utama pada penelitian ini, khususnya untuk melihat pengaruh tingkat demokrasi, kualitas regulasi dan efektivitas pemerintahan terhadap tingkat kontrol korupsi di negara miskin, menengah dan kaya, apakah terdapat kesamaan atau perbedaan faktor tersebut yang mempengaruhi tingkat pengendalian korupsi.

Literatur review dan Pengembangan Hipotesis

Pada suatu negara sering adanya konflik kepentingan antara rakyat pemerintah. Tindakan pemerintah membutuhkan kontrol dan pengawasan dari rakyat selaku pemilik sumber daya. Namun dalam pelaksanaan pemerintah melakukan tindakan dengan membuat regulasi yang menguntungkan diri dan kelompoknya sehingga kewenangan rakyat untuk mengawasi sangat dibatasi. Pada teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) pemisahan kepemilikan dan kendali perusahaan dapat menyebabkan manajer mengerjakan apa yang menjadi kepentingannya diatas kepentingan pemilik. Demikian pula dalam bernegara, pemerintah selaku agen seringkali melakukan tindakan yang menjadi kepentingannya bukan untuk kepentingan rakyat selaku pemilik negara. (Eisenhardt, 1989) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan 3 asumsi dasar sifat manusia yaitu (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai masa yang akan datang (bounded rationality) (3) manusia berusaha menghindari risiko dan hal ini menjadikan pemerintah dalam mengelola negara cenderung memiliki sifat oportunistik untuk mencapai kepentingan diri sendiri.

Demokrasi adalah salah satu bentuk pengawasan rakyat terhadap pemerintahan, salah satu penyebab korupsi terbesar adalah pemerintahan yang otoriter (Fackler & Lin, 1995); (Brewer et al., 2008); (Lederman et al., 2005); (Elbasani & Selo Sabic, 2017). (Fackler & Lin, 1995) menyebutkan pemerintahan otoriter merasa berkuasa dan tidak ada pengawasan sehingga menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau keluarganya dan inilah hal utama dari korupsi. Salah satu ciri negara maju menurut Bank dunia adalah adanya kehidupan demokrasi yang matang. Tingkat demokrasi ini selain dalam pemilihan pemerintahan juga adanya tingkat kebebasan masyarakat dalam berpendapat, berkumpul. Negara miskin salah satu ciri menurut Bank Dunia adalah banyak terjadi pendindasan, pemberontakan, pemanfaatan oleh pihak yang berkuasa sewenang-wenang sehingga tingkat demokrasi masih rendah, maka hipotesis penelitian ini:

H1 :Tingkat demokrasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengendalian korupsi.

United Nations Development Program (UNDP, 1997) mendefinisikan pemerintahan adalah suatu keterampilan dalam melaksanakan kekuasaan dalam bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, persatuan dan kebersamaan sosial dalam masyarakat.

Bank dunia menyebutkan pemerintah yang efektif adalah yang mampu menyediakan sarana, prasarana dasar, sistem pendidikan, transportasi, tingkat kesehatan dan kesempatan berusaha. Kualitas pemerintahan yang efektif maka tingkat korupsi akan menurun (Churchill et al., 2013); (Türedi & Altiner, 2016), maka hipotesis penelitian ini:

H2 : Tingkat Efektivitas Pemerintahan berpengaruh positif terhadap pengendalian korupsi

Regulasi dibuat untuk kepentingan rakyat agar kehidupan menjadi lebih efisien dan efektif serta melindungi seluruh rakyat dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat. Regulasi berdasarkan teori dan faktor politik serta kondisi ekonomi (Harry i. wolk, James L. Dodd, 2008)

Teori Regulasi *public interest* diasumsikan memiliki kepentingan terbaik untuk seluruh masyarakat. *The Interest Group Theory* menyebutkan bahwa menetapkan regulasi atau aturan yang dilihat dari kepentingan sekelompok pihak tertentu. (Huynh & Jacho-Chávez, 2009); (Churchill et al., 2013) menemukan bahwa kualitas regulasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat korupsi. Tingkat transparansi dimulai dengan kualitas regulasi karena suatu negara yang otoriter maka tingkat transparansi dan kualitas regulasinya rendah, maka hipotesis penelitian ini

H3 : Kualitas Regulasi berpengaruh terhadap tingkat Pengendalian Korupsi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sumber data dari Bank Dunia yaitu *Worldwide Governance Indicator*. Sampel penelitian ini dengan metode *cluster* yaitu dikelompokkan menurut Benua dan menurut Tingkat Pendapatan nasional sehingga sampel mewakili 5 benua dan juga mewakili negara miskin, sedang berkembang dan negara berkembang, sampel berjumlah 73 negara dengan data selama 5 tahun (1916 s/d 2020). Pengujian hipotesis dengan analisis data panel, model ekonometrika:

$$CCit = \beta_0 + \beta_1 DMit + \beta_2 GEit + \beta_3 RQit + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Deskriptif Statistik

Keterangan	Demokrasi	Govt. Effective	Reg. Quality	Control Corruption
N	365	365	365	365
Mean	0,3931	0,4403	0,4930	0,3908
SD	0,0444	0,0496	0,0448	0,0565
Poor	-0,1956	-0,4548	-0,5560	-0,4288
Middle	0,2290	0,0892	0,2749	-0,0851
Rich	1,0192	1,5051	1,3604	1,4485

Variabel independen maupun variabel dependen negara semakin tingkat tinggi ekonominya maka tingkat demokrasi, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi dan kontrol korupsi semakin tinggi. Pengelompokan negara berdsarkan tingkat pendapatan per kapita oleh bank dunia maka negara maju adalah negara dengan pendaptan per kapita lebih tinggi daripada \$11.456 atau menurut UNDP memiliki tingkat indeks pembangunan manusia (Human Development Index/HDI) > 0,80 – 1.00) sedangkan negara sedang berkembang HDI antara 0,50 s/d 0,80 dan negara mesikin dengan HDI dibawah 0,50 atau dengan tingkat pendaptan per kapita lebih rendah dari \$900.

Tabel 2.
Hasil Uji Regresi

Keterangan	Koef.	t.	Sig.
Simultant:			
Konst.	-0,107	-2,654	0,008
Demo.	0,298	6,993	0,000
Govt, Eff.	0,470	9,846	0,000
Reg. Qua.	0,354	6,279	0,000
Poor :			
Konst.	0,050	0,321	0,756
Demo.	0,480	2,225	0,050
Govt, Eff.	0,713	1,884	0,098

Keterangan	Koef.	t.	Sig.
Reg. Qua.	0,0834	0,1979	0,847
Middle :			
Konst.	-0,270	-3,121	0,008
Demo.	0,634	3,977	0,002
Govt, Eff.	0,792	3,740	0,003
Reg. Qua.	-0,0729	-0,292	0,771
Rich :			
Konst.	-1,165	-2,901	0,014
Demo.	0,369	1,905	0,083
Govt, Eff.	0,432	1,348	0,205
Reg. Qua.	1,094	3,066	0,011

Hasil uji regresi secara bersamaan menunjukkan bahwa variabel demokrasi, efektivitas pemerintahan dan kualitas regulasi berpengaruh signifikan terhadap kontrol korupsi untuk semua negara. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu bahwa adanya demokrasi maka terdapat pengawasan pemerintahan oleh masyarakat sehingga akan meningkatkan tingkat pengendalian korupsi (Treisman, 2000); (Lederman et al., 2005); (Churchill et al., 2013).

Pemerintahan yang efektif adalah yang mampu menyediakan sarana, prasarana dasar, sistem pendidikan, transportasi, tingkat kesehatan dan kesempatan berusaha, sehingga pemerintah yang efektif akan menurunkan korupsi dan meningkatkan tingkat pengendalian yang memiliki berpengaruh signifikan dalam pengendalian korupsi (Türedi & Altiner, 2016); (Brewer et al., 2008) dan (Churchill et al., 2013).

Namun dari tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat pendapatan/ kemakmuran ekonomi berkorelasi signifikan dengan tingginya tingkat demokrasi, efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan terhadap variabel yang mempengaruhi tingkat kontrol korupsi.

Di negara miskin variabel yang berpengaruh adalah demokrasi. Pemerintahan yang otoriter maka berkorelasi dengan korupsi dan tingkat korupsi yang tinggi menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang rendah serta distribusi pendapatan yang timpang sehingga tingkat kemiskinan tinggi. Jatuhnya pemerintahan di beberapa negara seperti di Nigeria, Libia, Haiti, Myanmar, orde baru di Indonesia karena pemerintahan yang otoriter. Pemerintahan otoriter yang tidak demokratis maka fungsi pengawasan lemah akibatnya korupsi tinggi dan tingkat pengendalian korupsi rendah.

Pemerintahan yang tidak demokratis juga mengakibatkan pemerintahannya tidak efektif, pada negara yang tingkat pendapatan menengah maka tingkat demokrasi sudah mulai membaik maka variabel demokrasi dan efektivitas pemerintahan yang berpengaruh signifikan. Negara menengah atau sedang berkembang pemerintahan mulai terjadi transisi dari otoriter menuju demokrasi sehingga ada kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Negara menengah maka sarana publik seperti pendidikan, kesehatan, informasi dan infrastruktur mulai membaik demikian pula dengan keterbukaan ekonomi dan kebijakan yang baik dapat meningkatkan kontrol terhadap korupsi. Di Indonesia yang telah mengalami 77 tahun merdeka dan telah berganti pemerintahan beberapa kali maka sudah mulai belajar dari kegagalan yang pernah terjadi. Pergantian presiden pertama dan kedua terjadi karena pemerintahan yang tidak demokrasi sehingga tata kelola pemerintahan yang buruk dan berakibat pada tingkat korupsi yang tinggi sehingga rakyat bergejolak dan menjatuhkan pemerintah. Di Indonesia sejak krisis Moneter 1997/1998 dan dari nasehat IMF maka tata kelola pemerintahan yang baik sudah mulai diterapkan seperti adanya Mahkamah Konstitusi, Ombudsman, Indendensi Bank Sentral.

Negara maju dengan tingkat demokrasi yang sudah baik demikian pula dengan efektivitas pemerintahan yang baik maka yang berpengaruh signifikan adalah kualitas regulasi. Negara maju maka semua sistem sudah berjalan dengan baik maka kualitas regulasi yang harus dijaga kualitasnya sehingga regulasi yang dibuat benar-benar untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Teori regulasi menyatakan bahwa pembuatan regulasi selain berdasarkan teori untuk kepentingan rakyat namun juga dipengaruhi oleh kepentingan politik, dan

ekonomi kelompok tertentu. Maka variable regulasi yang merupakan variable utama yang signifikan mempengaruhi tingkat pengendalian korupsi. Penyusunan regulasi harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak bukan pada kelompok tertentu saja.

Di negara maju tingkat demokrasi sudah tinggi karena sistem peradilan, monitoring sudah berjalan dengan baik dan kebebasan masyarakat untuk berpendapat, berkumpul ataupun berusaha sudah berjalan dengan baik. Kondisi ini membuat tingkat demokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengendalian korupsi di negara maju. Demikian pula dengan efektifitas pemerintahan karena sarana, prasarana, sistem pendidikan, kesehatan, transportasi sudah tertata dan tersistem dengan baik, maka efektifitas pemerintahan tidak berpengaruh signifikan pada tingkat pengendalian korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tingkat demokrasi, efektifitas pemerintahan dan Kualitas regulasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengendalian korupsi. Untuk mengurangi dan mencegah korupsi maka perlu peningkatan kualitas demokrasi, efektifitas pemerintah dan kualitas regulasi.

Tingkat pendapatan negara berkorelasi positif dengan tingkat demokrasi, efektifitas pemerintah dan kualitas regulasi serta kontrol korupsi. Untuk itu untuk mengurangi atau mengendalikan tingkat korupsi suatu negara maka kebijakan yang dibuat harus mengacu pada tingkat pendapatan per kaita negara tersebut. Negara miskin maka tingkat demokrasi yang mendapat prioritas utama untuk kontrol korupsi. Negara sedang berkembang (middle) maka tingkat demokrasi dan efektifitas pemerintahan sedangkan di negara maju maka kebijakan regulasi yang menjadi variabel utama dalam pengendalian korupsi.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas variabel selain dari variabel tata kelola pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brewer, G. A., Choi, Y., & Walker, R. (2008). Accountability, Corruption and Government Effectiveness in Asia: An Exploration of World Bank Governance Indicators. *International Public Management Review Electronic Journal*, 8. [https://doi.org/10.1016/S0732-1317\(08\)17012-9](https://doi.org/10.1016/S0732-1317(08)17012-9)
- Churchill, R. Q., Agbodohu, W., & Arhenful, P. (2013). *Determining Factors Affecting Corruption : A Cross Country Analysis*.
- Djayasinga, M., & Prasetyo, T. J. (2019). The effect of government effectiveness, rule of law and control of corruption toward tax obedience. *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(16 SE-General Section), 136–143. <https://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/324>
- Effendi, M. A. (2009). *The power good corporate governance : teori dan implementasi*. Salemba Empat.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.2307/258191>
- Elbasani, A., & Selo Sabic, S. (2017). Rule of law, corruption and democratic accountability in the course of EU enlargement. *Journal of European Public Policy*, 25, 1–19. <https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1315162>
- Fackler, T., & Lin, T. (1995). Political Corruption and Presidential Elections, 1929-1992. *The Journal of Politics*, 57(4), 971–993. <https://doi.org/10.2307/2960398>
- Farooq, A., Shahbaz, M., Arouri, M., & Teulon, F. (2013). Does corruption impede economic growth in Pakistan? *Economic Modelling*, 35(C), 622–633. <https://doi.org/DOI:10.1016/j.econmod.2013.08>,
- Fathia, S., Gamayuni, R., & Prasetyo, T. (2020). *Exploration of good governance on the minimization of corruption in Asia-Pacific* (pp. 262–265). <https://doi.org/10.1201/9780367853778-68>
- Gupta, S., Davoodi, H., & Alonso-Terme, R. (2002). Does corruption affect income inequality

- and poverty? *Economics of Governance*, 3(1), 23–45.
<https://doi.org/10.1007/s101010100039>
- Harry i. wolk, James L. Dodd, J. J. R. (2008). *Accounting Theory / Conceptual Issues in a Political and Economic Environment* (7th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Huynh, K., & Jacho-Chávez, D. (2009). Growth and Governance: A Nonparametric Analysis. *Journal of Comparative Economics*, 37, 121–143. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2008.08.003>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Lederman, D., Loayza, N., & Soares, R. (2005). Accountability and Corruption: Political Institutions Matter. *Economics & Politics*, 17, 1–35. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0343.2005.00145.x>
- Mauro, P. (1995). Corruption and Growth*. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681–712. <https://doi.org/10.2307/2946696>
- UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 1 (2001).
- Sulaiman, S., Nizam, A., Farid, F. H. M., Kesuma, T. M., Madjid, I., & Siregar, R. Y. D. (2019). The Role of Good Government Governance Principles in Enhancing the Performance of Public Organization in Aceh, Indonesia. *Proceedings of the 1st Aceh Global Conference (AGC 2018)*.
- Treisman, D. (2000). The causes of corruption: a cross-national study. *Journal of Public Economics*, 76(3), 399–457. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(99\)00092-4](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00092-4)
- Türedi, S., & Altiner, A. (2016). ECONOMIC AND POLITICAL FACTORS AFFECTING CORRUPTION IN DEVELOPING COUNTRIES. *International Journal of Economics and Research (IJER)*, 7, 104–120.
- UNDP. (1997). Human Development Report 1997. *UNDP (United Nations Development Programme)*. ,